

Judul : MKMK harus tuntaskan keresahan publik
Tanggal : Minggu, 29 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

MKMK Harus Tuntaskan Keresahan Publik

PROSES pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto berpotensi gagal jika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyimpulkan adanya pelanggaran kode etik oleh hakim MK dalam memutus perkara uji materi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Itu dapat terjadi apabila ada yang menjadikan putusan MKMK tersebut sebagai alasan permohonan baru untuk membatalkan Putusan MK Nomor 90. Pengamat hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengakui putusan MK pada dasarnya bersifat final dan mengikat begitu diucapkan. Namun, putusan MK hanya dapat dibatalkan dengan putusan MK.

Salah satu presedennya terjadi pada model keserentakan pemilu yang diubah MK melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. "Dalam hal ada bukti kuat yang kemudian diputus MKMK bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik oleh hakim MK dalam memutus Putusan Nomor 90, hal itu bisa menjadi basis dalil permohonan baru untuk membatalkan putusan MK melalui pengujian baru ke MK atas konstitusionalitas Pasal 169 huruf q (UU Pemilu)," jelas Titi kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Kendati demikian, ia mengakui sulit mengganjal langkah putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut, kecuali jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan ketidakbenaran dokumen persyaratan yang diajukan saat proses pendaftaran. Ia pun berpesan, "Pilihlah calon yang dihasilkan dari proses yang kredibel, jujur, dan adil.

"Pilihlah calon yang dihasilkan dari proses yang kredibel, jujur, dan adil. Bukan produk dari proses yang kontroversial dan penuh benturan kepentingan."

Titi Anggraini
Pengamat hukum

Bukan produk dari proses yang kontroversial dan penuh benturan kepentingan," imbuh Titi.

Secara terpisah, politikus Partai Perindo Michael Victor Sianipar berharap MKMK menanggapi serius laporan masyarakat terhadap MK yang banyak bermunculan. Terbaru, 16 guru besar tata negara melaporkan Ketua MK atas dugaan pelanggaran kode etik.

Menurut Michael, laporan tersebut merepresentasikan kegelisahan publik yang jika tidak dijawab tuntas, akan menurunkan kepercayaan publik kepada MK. "Kalau isu ini tidak tuntas terjawab, kepercayaan publik terhadap negara akan turun drastis dan ini berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas berbangsa bernegara ke depan," ujarnya.

Di sisi lain, Michael berharap dugaan nepotisme yang melibatkan penguasa tidak benar. "Dasar negara kita, yaitu UUD, ditulis untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan ataupun praktik kolusi dan nepotisme di lembaga tertinggi negara," pungkasnya. (Pr/Put/P 3)